

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agar dapat mengikuti perkembangan zaman, maka sangat penting bagi manusia untuk menjalani pengembangan diri. Ketika individu mengembangkan dirinya, ia juga berkontribusi terhadap kemajuan berbagai aspek masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang terjadi di alam pada hakikatnya berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan. Thomas Kuhn, dalam karyanya "*The Structure of Scientific Revolution*", menyebut perubahan ini sebagai pergeseran paradigma. Paradigma dapat digambarkan sebagai perspektif, pendekatan, prinsip dasar, atau metode yang diadopsi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks di lokasi tertentu (Issundari, 2017).

Istilah Arab untuk ilmu pengetahuan adalah "ilm", yang juga disebut sebagai "ilmu". Istilah ini mencakup berbagai kegiatan dan kemungkinan. Istilah sains, jika disertai dengan kata-kata seperti *science*, *wetenschap*, dan *wissenschaft*, terkadang bisa menyesatkan. Tidak semua perspektif ini secara akurat menangkap esensi ilmu pengetahuan sebenarnya. Sains mencakup serangkaian upaya manusia yang melibatkan penerapan berbagai metodologi untuk mengumpulkan pengetahuan secara sistematis tentang fenomena alam,

masyarakat, dan individu. Kekhususan inilah yang membedakan ilmu pengetahuan dengan sesuatu yang bersifat acak atau sewenang-wenang.

Konsep sains juga dapat ditafsirkan dari sudut pandang Barat. Istilah “sains” berdasar dari kata Latin “*scientia*” yang berarti pengetahuan. Dalam konteks ini, tahap awal pemahaman sains memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan belajar bagaimana menangani berbagai situasi secara efektif, seperti merespons hujan, banjir, dan bencana lainnya (Suryadilaga, 2013).

Kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu saja melainkan meluas hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah melakukan pengorbanan yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaannya, salah satunya adalah memperjuangkan akses pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Pendidikan merupakan aset krusial dan garda depan dalam membina generasi penerus bangsa (Farid dkk, 2023). Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mengharapkan system pendidikan yang mengedepankan optimalisasi potensi individu, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan alaminya, tanpa dipaksa untuk menyelaraskan dengan kepentingan kelompok tertentu (Robandi & Ibrahim, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga segenap bangsa Indonesia dan membina kesejahteraan serta mencerdaskan warga negaranya. Selain itu, pemerintah bertugas untuk berkontribusi aktif dalam pembentukan tatanan global yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dari pemerintah guna meningkatkan kecerdasan dan kemajuan hidupnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia, sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai suatu usaha yang disengaja dan terorganisir untuk menciptakan lingkungan dan proses yang kondusif bagi pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan siswa secara aktif mengembangkan kemampuan bawaan mereka, yang mencakup keterampilan spiritual, agama, disiplin diri, intelektual, etika, dan praktis yang penting untuk pertumbuhan pribadi mereka, serta kemajuan masyarakat dan bangsa.

Tujuan pendidikan adalah untuk membekali generasi mendatang dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan agar menjadi individu yang cerdas dan cakap. Hal ini juga bertujuan untuk menanamkan keyakinan yang kuat terhadap ketaqwaan kepada Allah SWT, serta menumbuhkan kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat berbangsa dan bernegara. Tujuan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan peserta didik. Implementasi tujuan

tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan bimbingan belajar dan pelatihan, dengan tujuan akhir mempersiapkan siswa untuk inkuiri di masa depan (Jurusan dkk., 2016).

Untuk meningkatkan kualitas mengajar dan membina siswa yang cakap, proses pembelajaran mempunyai arti yang sangat penting. Sebagai seorang pendidik, ketika dihadapkan pada keadaan yang menantang, menjadi keharusan untuk membangun *platform* atau pendekatan yang mendorong berkembangnya kreativitas siswa dan memudahkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Salah satu metode tersebut adalah pembelajaran berbasis proyek, sebagaimana dijelaskan oleh Fathurrohman (2016). Model pembelajaran ini berkisar pada proyek dan bertujuan untuk menumbuhkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi secara efektif, namun juga memberdayakan mereka untuk menciptakan produk akhir yang bermakna dan berharga.

Penelitian penulis berpusat pada penerapan teknik pembelajaran berbasis proyek pada bidang PPKn. PPKn yang merupakan singkatan dari pendidikan politiks ecara khusus menekankan pentingnya warga negara yang dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara (Nasional, 1982). Bentuk pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang harus menjadi pedoman individu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ranah pendidikan PPKn, penulis menemukan beberapa contoh penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di sekolah Madrasah Muhammadiyah 1 Malang, ditemukan

bahwa guru-guru pada umumnya mengandalkan metode pengajaran tradisional, seperti pembelajaran penemuan (*discovery learning*), yang mana mereka tidak memberikan materi pelajaran secara langsung pada kelas PPKn. Namun jika dicermati, ditemukan beberapa faktor yang menghambat proses pembelajaran. Pertama, kurangnya perhatian dan kemandirian siswa dalam pembelajaran, terlihat dari minimnya jumlah siswa, hanya 12 dari 32 siswa yang aktif berinteraksi dengan guru dengan bertanya. Kedua, guru masih mengandalkan gaya mengajar ceramah dalam menyampaikan materi, sehingga mengakibatkan lingkungan belajar berpusat pada guru dan monoton.

Berbeda dengan sekolah SMP Muhammadiyah Situbondo, para guru berupaya mengeksplorasi berbagai pendekatan pengajaran, termasuk penerapan pembelajaran berbasis proyek pada berbagai mata pelajaran. Berdasarkan uraian yang ditemukan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Penerapan Metode *Project-Based Learning* Berbasis Muatan Lokal pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X Madrasah Aliyah Al UMM Malang”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Mengamati teknik pedagogi yang digunakan pendidik membuat proses perolehan pengetahuan semakin membosankan.
2. Salah satu permasalahan yang perlu diatasi adalah kurangnya antusiasme siswa terhadap mata pelajaran PPKn.
3. Siswa sering kali mengalami rasa kantuk dan tidak tertarik apda mata pelajaran PPKn karena kurangnya efektifitas penerapan ilmunya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penerapan metode *project based learning* berbasis muatan lokal pada pelajaran PPKn di kelas X Madrasah Aliyah Al UMM Malang?
2. Bagaimana keefektifan penerapan metode *project based learning* berbasis muatan lokal pada pelajaran PPKn di kelas X Madrasah Aliyah Al UMM Malang?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peningkatan perhatian belajar melalui penerapan *project based learning* pada siswa kelas X Madrasah Aliyah Al UMM Malang pada mata pelajaran PPKn.
2. Untuk mengetahui metode pembelajaran yang efektif bagi siswa kelas X Madrasah Aliyah Al UMM Malang pada mata pelajaran PPKn.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan pada bidang PPKn dengan meningkatkan kelengkapan hasil pembelajaran melalui penerapan metode belajar mengajar yang efektif.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Program Studi PPKn

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang bertujuan untuk menyempurnakan metode

pembelajaran yang selaras dengan karakteristik unik mahasiswa melalui pengembangan dan penelitian.

b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, pengalaman baru dan wawasan berharga diperoleh dalam bidang metode pembelajaran, memungkinkan penerapan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan proses pembelajaran.

c. Bagi Sekolah

Pemanfaatan berbagai metode pembelajaran dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah, memberikan masukan yang berharga dan berkontribusi terhadap kemajuan program sekolah, khususnya dalam meningkatkan proses belajar ke arah yang lebih baik.

**F. Pengasahan Istilah**

Untuk membicarakan masalah penelitian ini, penting untuk menegaskan beberapa kata kunci, yang harus dijelaskan pengertiannya dan pembatasannya, seperti:

**1. *Project-Based Learning***

*Project-Based Learning* menurut *The George Lucas Educational Foundation* (dikutip dalam Muniarti, 2016) adalah pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya standar isi dalam kurikulumnya.

Melalui metode pembelajaran ini, pendidik dituntut untuk mengembangkan pertanyaan penuntun (*a guiding question*) kemudian melakukan eksperimen secara kolaboratif. Hal ini memungkinkan setiap peserta didik pada akhirnya mampu menjawab pertanyaan penuntun.

## **2. Muatan Lokal**

Muatan local menurut Zainal Arifin adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik, keunggulan, kebutuhan, dan lingkungan dari masing-masing daerah guna mencapai tujuan pendidikan tertentu.

## **3. Mata Pelajaran PPKn**

Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mendidik para generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang demokrasi dan dapat berpartisipasi dalam membela negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, harapannya adalah dapat membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.